



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Resti Elviza¹

Mike Kusuma Dewi²

Aminar Sutra Dewi³

Wellia Novita⁴

Zusmawati⁵

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP Padang

Email : restielviza441@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP Padang

Email : miekusumadewi@akbpstie.ac.id

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP Padang

Email : aminarsutradewi@akbpstie.ac.id

⁴Universitas Putra Indonesia YPKT Padang

Email : wellianvt1@gmail.com

⁵Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP Padang

Email : zusmawati@akbpstie.ac.id

Diterima: 7 Desember 2024

Direview: 16 Desember 2024

Dipublikasikan: 19 Januari 2025

Abstract

Capital expenditure is a form of capital creation, which includes investments and expenditures made to acquire or develop assets with an expected economic return period of more than one year. The aim of this research is to determine the effect of capital expenditure on local revenue (PAD) and balancing funds in districts/cities in West Sumatra Province in 2019-2023. The research method used is a quantitative research method. This data comes from the following websites: <https://www.bps.go.id/> and <https://djpk.kemenkeu.go.id/>, which are managed by the Indonesian Directorate General of Financial Balance (DJPK). This research uses 95 reports covering the years 2019-2023 covering districts/cities in West Sumatra province, to examine the realization of local original income, balancing funds, and district/city capital expenditures in West Sumatra province, namely using the Econometric Views (EViews) version of the software. 10 using descriptive statistical tests, model feasibility, classical assumptions, panel data regression, hypotheses, and the Adjusted R Square coefficient test used in data analysis. The findings of this study confirm the null hypothesis that balancing funds do not influence capital expenditure positively and significantly, but local revenue influences capital expenditure positively and significantly.

Keywords: Capital Expenditures, Regional Original Income, Regional Balancing Fund

Abstrak

Belanja modal merupakan salah satu bentuk penciptaan modal, yang mencakup investasi dan pengeluaran yang dilaksanakan untuk memperoleh atau mengembangkan aset dengan jangka waktu pengembalian ekonomi yang diharapkan lebih dari satu tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan pada Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Data ini bersumber dari situs web berikut: <https://www.bps.go.id/> dan <https://djpk.kemenkeu.go.id/>, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) RI. Penelitian ini menggunakan 95 laporan yang mencakup tahun 2019-2023 yang meliputi kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat, untuk meneliti realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat yaitu menggunakan software Econometric Views (EViews) versi 10 dengan menggunakan uji statistik deskriptif, kelayakan model, asumsi klasik, regresi data panel, hipotesis, dan uji koefisien Adjusted R Square yang digunakan dalam analisis data. Temuan dari penelitian ini mengkonfirmasi hipotesis nol bahwa dana perimbangan tidak mempengaruhi belanja modal secara positif dan signifikan, tetapi pendapatan asli daerah mempengaruhi belanja modal secara positif dan signifikan.

Kata kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Daerah

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan administratif dan pelayanan terhadap masyarakat supaya lebih efektif, maka belanja modal biasanya dilaksanakan untuk mengembangkan aset tetap yang sudah menjadi kewenangannya. Investasi yang diperuntukan buat pembelian ataupun perolehan barang, pengembangan aset tetap yang nilainya bisa digunakan buat beberapa periode akuntansi, serta penyediaan layanan guna menunjang penerapan bermacam program pemerintah daerah merupakan contoh belanja modal. Menurut definisi ini, semua dana yang dibelanjakan APBN untuk infrastruktur dan barang tahan lama dianggap sebagai belanja modal (Astuty, 2022). Alokasi belanja modal dalam APBN masih relatif kecil dan realisasinya belum sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, sementara itu Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 mensyaratkan belanja modal dalam APBD minimum 29% dari total belanja daerah. Sebagian besar dana yang dialokasikan dalam APBN masih berpusat buat belanja rutin yang produktivitasnya rendah (Silviani & Adiputra, 2023).

Berdasarkan data Belanja Modal dari tahun 2019 hingga 2023 memperlihatkan fluktuasi. Adanya penurunan Belanja Modal saat 2020 dengan realisasi sejumlah 0,67% dengan penurunan anggaran sejumlah 0,91%. Lebih lanjut, realisasi pengurangan belanja modal saat 2021 dan 2023 masing-masing sejumlah 0,92% dan 0,96%. Belanja modal belum terpenuhi sesuai dengan jumlah yang dianggarkan, yaitu 0,73% saat 2021 dan 0,94% saat 2023 (Djpk, 2024). Perihal ini disebabkan terjadi penyusutan akibat anggaran yang bergeser fokus dari investasi modal ke kebutuhan mendesak yang lain seperti bantuan sosial dan kesehatan. Keadaan ini menampilkan buruknya kinerja seluruh pemerintah wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Penurunan dan ketidakpenuhan Belanja Modal menunjukkan kurangnya efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini mencerminkan adanya masalah dalam pengelolaan sumber daya dan prioritas pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagian kegiatan yang telah dijadwalkan tidak terlaksana, serta sebagian barang dan jasa yang sebaiknya dibeli tidak terlaksana. Bila ditelusuri lebih lanjut, belanja operasional mempunyai serapan anggaran sangat besar. Pada tahun 2023 Pemerintah kabupaten/kota telah mengeluarkan dana sebesar 21.149,22 miliar rupiah untuk belanja daerah, dengan realisasi sebesar 76,69 persen untuk belanja operasi, dan hanya 14,52 persen untuk belanja modal. Sedangkan belanja transfer hanya terealisasi sebesar 0,44 persen dan belanja tidak terduga sebesar 5,35 persen (Bps, 2024)

Proses pembangunan ekonomi Sumatera Barat tentu terhambat oleh rendahnya realisasi belanja pemerintah, yang berujung pada permasalahan perencanaan proyek dan kegiatan pembangunan, kemampuan dan kapasitas buat melakukan proyek serta kegiatan pemerintah. Jika pelaksana tidak memiliki kemampuan yang memadai, proyek tidak akan berjalan dengan baik, yang mengarah pada kegagalan dalam mencapai tujuan pembangunan. Tingginya alokasi untuk Belanja Operasi dibandingkan dengan Belanja Modal menunjukkan prioritas yang tidak seimbang, tanpa investasi yang cukup dalam infrastruktur dan proyek pembangunan, pertumbuhan jangka panjang akan terhambat yang berdampak pada produktivitas masyarakat dan membuat investor tidak mau melakukan investasi di wilayah tersebut (Bps, 2024).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Silviani & Adiputra (2023) menemukan bahwa ada pengaruh positif PAD terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dengan mengalokasikan belanja modal secara seimbang dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diterima, maka pemerintah daerah sudah sukses mengatur PAD dari tahun 2016 hingga dengan tahun 2021. Hasil penelitian serupa juga yang dilakukan oleh Zulkarnain & Haryati (2023), Malau et al (2020), Alvaro & Prasetyo (2020) menemukan bahwa ada pengaruh positif PAD terhadap Belanja Modal. Perihal ini disebabkan program sarana kepada masyarakat dan infrastruktur sudah terlaksana dengan baik. Dimana infrastruktur publik juga akan terus menjadi baik dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian berbeda dengan yang dilakukan oleh Shatila et al (2023) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh positif PAD terhadap Belanja Modal. Hal dikarenakan jika dilihat secara keseluruhan PAD masih kecil kontribusinya terhadap belanja modal dan lebih banyak dimanfaatkan untuk operasional.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Hadi & Kusuma (2023), menemukan bahwa ada pengaruh positif Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar tahun 2013-2021, disebabkan oleh peningkatan alokasi Belanja Modal sehingga terjadi peningkatan infrastruktur layanan publik. Hasil penelitian serupa juga yang dilakukan oleh Silviani & Adiputra (2023), Irwan et al (2022), Muttaqin et al (2021), Salim (2019) menemukan bahwa ada pengaruh positif

Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Perihal ini disebabkan penggunaan dana perimbangan yang tepat sasaran untuk kesejahteraan dan pembangunan masyarakat, serta karena pemerintah pusat dan daerah terus bekerja sama lewat desentralisasi untuk mendorong penyaluran dana negara.

Hasil penelitian berbeda dengan yang dilakukan oleh [Shatila et al \(2023\)](#) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Perihal ini bisa terjadi sebab daerah tersebut hanya mendapatkan sebagian kecil dari DAU yang sepatutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin belanja modal. Sebab sumber dana untuk hasil sumber daya alam serta pajak berubah tiap tahunnya, DBH tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Dampaknya, dana bagi hasil tidak bergantung pada jumlah anggaran belanja modal di sesuatu wilayah dan tidak mampu menyediakan layanan publik yang direalisasikan lewat belanja modal. Karena penyaluran belanja modal tidak bertambah setiap kali dana alokasi khusus meningkat, DAK tidak berpengaruh terhadap hal ini. Daerah - daerah khusus yang dipilih karena alasan tertentu menjadi sasaran Dana Alokasi Khusus.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada Kabupaten/Kota Provinsi Maluku, Kabupaten Langkat, Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, dan Kota Mojokerto sedangkan penelitian ini mengembangkan hipotesis yang lebih spesifik tentang pengelolaan keuangan daerah berupa pengelolaan dana PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2023. Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan software SmartPLS dan SPSS sedangkan penelitian ini menggunakan software Econometric Views (EViews) dalam mengolah data. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang keuangan publik dengan mengaitkan teori keagenan yang menunjukkan bahwa penggunaan PAD dan Dana Perimbangan dilakukan secara transparan dan akuntabel dalam konteks pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan di pemerintah daerah. Dengan fokus pada 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal, serta faktor-faktor seperti kepercayaan, tanggung jawab, dan legitimasi mempengaruhi keputusan anggaran.

Mengenai perihal ini, peneliti berupaya untuk mengatasi beberapa masalah seputar belanja modal tahun 2019-2023 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Dengan terjadinya penurunan belanja modal mengakibatkan dampak pada pembangunan infrastruktur. Dampak fluktuasi belanja modal yang terjadi pada hal infrastruktur yaitu adanya jalan yang rusak dan berlubang di Kenagarian Pagadih, Kabupaten Agam dan sebagian jalan sekitar 10 km masih belum teraspal yang membuat kendaraan kesulitan saat melewati jalan tersebut [Wahyudi, J\(2024\)](#). Kenyataan kalau pembangunan infrastruktur belum memadai menunjukkan pemerintah daerah belum mengelola uang belanja modal yang sudah disalurkan pemerintah pusat.

Secara khusus, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan fakta bahwa penelitian ini membekali pembaca dengan informasi yang mereka butuhkan untuk menganalisis topik yang sama. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai acuan bagi pemerintah pusat dan daerah terkait PAD dan Dana Perimbangan, agar dapat membantu dalam membuat keputusan terbaik untuk mencapai target pembangunan yang diharapkan. Kebaruan penelitian ini yaitu pada tempat penelitian dan keadaan pasca pandemi, yang memberikan batasan pada topik yang diteliti, seperti penurunan pendapatan asli daerah yang menurunkan kapasitas belanja modal. Temuan penelitian ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya karena dipengaruhi oleh anggaran daerah tiap - tiap penelitian.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Berbagai pihak dalam kontrak berusaha melindungi kepentingan mereka sendiri, dan teori keagenan memberikan penjelasan untuk fenomena ini. Bagaimana pemerintah daerah mengevaluasi dan mendistribusikan aset yang didanai oleh pemerintah pusat yang merupakan hal mendasar bagi fungsi mereka sebagai agen APBD yang mengawasi pengeluaran modal ([Adiputra & Silvani, 2023](#)) Kewenangan untuk mengelola dana pemerintah pusat, seperti PAD dan Dana Perimbangan, sudah didelegasikan kepada pemerintah daerah. Sebagai agen, Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang tepat terkait penggunaan dana tersebut demi kepentingan masyarakat. Tugas utama pemerintah daerah adalah mengawasi dan mengatur pengeluaran modal yang didanai melalui

PAD dan Dana Perimbangan. Dalam konteks ini, teori keagenan menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dan transparansi agar keputusan yang diambil sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Perihal ini mengaitkan pemakaian PAD dan Dana Perimbangan untuk belanja modal secara efisien dan efektif. Teori keagenan menjelaskan pentingnya penataan kontrak eksplisit guna mengatur hak dan tanggung jawab tiap - tiap pihak dalam interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini mencakup ketentuan mengenai pengelolaan aset yang didanai oleh pemerintah pusat.

Ketika satu entitas (prinsipal) mempekerjakan entitas lain (agen) untuk membuat keputusan atas nama mereka, pengaturan ini diterangkan melalui teori keagenan. Inti dari interaksi mereka adalah pendelegasian keputusan dalam perjanjian kontraktual, yang mewujudkan dinamika tanggung jawab dan kepercayaan (Salim, 2019).

Belanja Modal

Dilliana & Herdi (2022) Investasi dalam aset tetap yang terus menghasilkan pendapatan bahkan setelah tahun fiskal berakhir dikenal sebagai belanja modal. Ini mencakup investasi awal dalam suatu aset dan semua pengeluaran berikutnya yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap beroperasi, termasuk biaya infrastruktur dan pembangunan. Belanja modal merupakan salah satu bentuk penciptaan modal, yang mencakup investasi dan pengeluaran yang dilaksanakan untuk memperoleh atau mengembangkan aset dengan jangka waktu pengembalian ekonomi yang diharapkan lebih dari satu tahun (Hadi & Kusuma, 2023).

Belanja yang ditambahkan pada biaya operasi dan pemeliharaan untuk menutupinya merupakan belanja modal, yang dipakai untuk menumbuhkan pengeluaran selama lebih dari satu tahun. Kekayaan bersih yang tersedia cenderung menurun sebagai akibat dari belanja daerah, yang memberikan tekanan pada pemerintah daerah. Pembelian, penjualan, dan transaksi kredit dalam bentuk apa pun semuanya termasuk dalam laporan ini (Rinando & Rivandi, 2023).

Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana dikatakan oleh Ambya (2023) PAD berisi dana moneter yang dihimpun oleh daerah atau pajak yang diatur oleh peraturan daerah. Salah satu landasan otonomi daerah adalah apa yang dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah, yang merupakan hasil dari kegiatan ekonomi suatu daerah (Mahfudh et al., 2022). Salah satu pendekatan untuk menilai efektivitas anggaran daerah adalah dengan membandingkan keseluruhan pendapatan daerah dalam APBD. Berbagai kemungkinan sumber pendapatan yang dimiliki daerah memberikan kontribusi terhadap perolehan pendapatan asli daerah. Besarnya pendapatan daerah mempengaruhi secara signifikan terhadap efektivitas otonomi pemerintah kabupaten/kota. Dalam pembahasan otonomi daerah, sektor pendapatan daerah menjadi pertimbangan penting yang menentukan derajat otonomi daerah (Srinofril & Ananda, 2023).

Dana Perimbangan

Menurut Ambya (2023) guna menunjang kepentingan daerah khususnya dalam konteks desentralisasi, Dana Perimbangan ialah mekanisme penyaluran dana dari pemasukan APBN kepada wilayah otonom, dengan fokus pada kenaikan kesejahteraan publik dan mutu layanan secara lebih efektif. Dana Perimbangan merupakan sumber dana moneter yang disebarkan di seluruh daerah untuk membantu upaya desentralisasi. APBN merupakan sumber dana awalnya. Tujuannya adalah untuk mencegah pemerintah daerah terlilit utang dengan menjaga agar pertukaran sehari-hari antara daerah dan pemerintah daerah tetap terkendali (Dilliana & Herdi, 2022).

PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali, menurut Silviani & Adiputra (2023). Dengan mendistribusikan dana secara proporsional langsung dengan pertumbuhan PAD yang diterima, mereka telah dengan terampil mengawasi PAD dari tahun 2016 hingga 2021. Hal ini sesuai dengan temuan Zulkarnain & Haryati (2023), yang menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh positif pada belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Malau et al. (2020) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. PAD terhadap Belanja Modal di Provinsi Indonesia Tahun 2010-2018 berpengaruh positif, menurut penelitian Alvaro & Prasetyo (2020). Saat 2013–2017, PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, hal ini bertentangan

dengan hasil penelitian [Telaumbanua et al \(2021\)](#). Ketimpangan fiskal yang terjadi akibat pengelolaan keuangan daerah yang tidak efektif menjadi penyebabnya. Menurut [Mahfudh et al \(2022\)](#) Pendapatan Asli Daerah yang sebagai salah satu pilar kemandirian daerah ialah hasil dari kegiatan perekonomian di sesuatu daerah. Kinerja keuangan daerah bisa dinilai dengan membandingkan keseluruhan pendapatan daerah dalam APBD.

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023

Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Berlandaskan [Silviani & Adiputra \(2023\)](#) yang menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan ratcheting anggaran di kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2016-2021. Hal ini disebabkan karena pembangunan dan peningkatan infrastruktur daerah sangat bergantung pada penyaluran Dana Perimbangan. Berlandaskan penelitian [Hadi & Kusuma \(2023\)](#), Dana Perimbangan memberikan pengaruh positif terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Karanganyar tahun 2013 hingga 2021. Hal ini dikarenakan alokasi belanja modal meningkat sehingga pembangunan infrastruktur pelayanan publik semakin banyak. Hal ini menguatkan hasil [Irwan et al \(2022\)](#) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan memberikan pengaruh positif terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 hingga 2020. Berlandaskan penelitian [Muttaqin et al \(2021\)](#), Dana Perimbangan memberikan pengaruh positif terhadap belanja modal di Kabupaten Langkat tahun 2014 hingga 2018. Berlandaskan [Salim \(2019\)](#), Dana Perimbangan memberikan pengaruh positif terhadap belanja modal di kota/kabupaten di Provinsi Banten tahun 2015 hingga 2018. Tidak hanya membagikan dukungan keuangan kepada pemerintah daerah, Dana Perimbangan mendorong pembiayaan yang proporsional di berbagai bidang dalam upaya untuk menutup kesenjangan anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ([Yuswanto et al., 2020](#)).

H₂: Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023.

METODE PENELITIAN

Tujuan metode kuantitatif ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023. Grafik, tabel, dan diagram merupakan beberapa representasi visual dari temuan metode kuantitatif, yang didefinisikan dengan strategi sistematis dan terencana yang diawali dengan tahap desain penelitian ([Hermawan et.al, 2022](#)).

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian yang diambil adalah realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal yang mencakup 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023 yaitu berjumlah 95 data. Penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Barat karena Sumatera Barat menerima dana perimbangan yang signifikan dari pemerintah pusat, membuatnya perlu untuk diteliti bagaimana pengalokasian dana tersebut sesuai dengan yang diharapkan dan juga melihat bagaimana dana perimbangan dalam mengurangi ketimpangan yang terjadi antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Selain itu masih terdapat pembangunan infrastruktur yang belum memadai dalam hal pembangunan jalan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang perlu untuk diteliti lebih lanjut [Hendra, E. \(2023\)](#). Sampel penelitian berupa Realisasi PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal yang mencakup 19 Kabupaten/Kota tahun 2019-2023 yaitu berjumlah 95 sampel. Total sampling digunakan peneliti untuk mencakup semua individu agar lebih representatif daripada mengambil sampel yang lebih kecil. Dengan menggunakan total sampling dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang karakteristik sampel, serta dapat mengurangi bias yang mungkin terjadi ([Sugiyono, 2018](#)).

Teknik Pengumpulan Data

Berbeda dengan teknik pengumpulan data lainnya, dokumentasi yang berasal dari akar kata "dokumen" merupakan cara yang lebih sederhana dan efektif untuk menyusun data dari dokumentasi informasi yang ada ([Hardani et.al, 2020](#)). Data sekunder ialah data yang digunakan, dengan prosedur yang dipakai untuk menghimpun informasi dari lingkungan penelitian disebut sebagai teknik

pengumpulan data oleh [Ernawati et al \(2022\)](#). Prosedurnya melibatkan pemilihan dan pengumpulan data-data berupa catatan yang berkaitan dengan informasi penelitian, yang dihitung menggunakan data laporan keuangan realisasi pajak asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019-2023 yang diperoleh dari situs web resmi Badan Pusat Statistik (BPS) <https://www.bps.go.id/>, kemudian melakukan pengunduhan, pengelolaan data, guna melaksanakan analisis lebih lanjut terkait penelitian serta prosedur tampilan data.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses terstruktur untuk memproses, menafsirkan, dan mengurai data guna memperoleh kesimpulan yang bermakna. Alat yang dipakai adalah Econometric Views (EViews) versi 10 dengan menggunakan uji statistik deskriptif, kelayakan model, asumsi klasik, regresi data panel, hipotesis, dan uji koefisien Adjusted R Square. Berikut rumus dalam uji regresi data panel:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

Keterangan:

- Y_{it} = Belanja Modal
- X_{1it} = Dana Perimbangan
- X_{2it} = Pendapatan Asli Daerah
- α = Kemiringan slope
- β_1, β_2 = Koefisien regresi variabel independen
- e_{it} = Variabel pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1 Uji Statistik Deskriptif

Variabel	BM	PAD	DP
Mean	184.814.912,24	131.328.707,30	510.282.343,94
Max	554.992.586,6	989.902.818	992.118.633
Min	58.117.257,99	31.638.013,03	101.602.413,18
Std. Deviation	94.953.486,72	163.303.573,95	301.966.114,64
Observasi	95	95	95

Sumber: Data sekunder diolah E-Views ver. 10, (2024)

Nilai variabel penelitian tahun 2019 hingga dengan tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Variabel Belanja Modal bernilai rata-rata (*Mean*) sejumlah Rp184.814.912,24, nilai maksimum sejumlah Rp554.992.586,6, nilai minimum Rp58.117.257,99, dan nilai standar deviasi sejumlah Rp94.953.486,72. Hasil dari Uji analisis deskriptif statistik pada variabel PAD memperlihatkan bahwa nilai rata-rata (*Mean*) sejumlah Rp131.328.707,30, nilai maksimum sejumlah Rp989.902.818, nilai minimum Rp31.638.013,03, dan nilai standar deviasi sejumlah Rp163.303.573,95. Hasil dari Uji analisis deskriptif statistik pada variabel Dana Perimbangan memperlihatkan bahwa nilai rata-rata (*Mean*) sejumlah Rp510.282.343,94, nilai maksimum sejumlah Rp992.118.633, nilai minimum Rp101.602.413,18, dan nilai standar deviasi sejumlah Rp301.966.114,64.

Uji Kelayakan Model

Uji Chow

Tabel 2 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.935692	(18,74)	0.0006
Cross-section Chi-square	51.1193663	18	0.0000

Sumber: Data sekunder diolah E-Views ver. 10, (2024)

Uji Hausman

Tabel 3 Uji Hausman

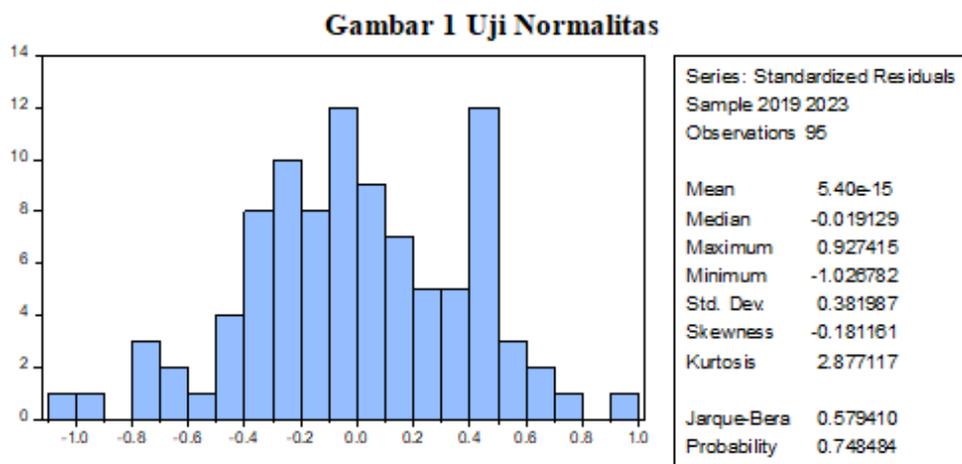
Test Summary	Chi-Sq.Statistic	Chi-Sq.d.f.	Prob.
Cross-section random	2.935692	(18,74)	0.0006

Sumber: Data sekunder diolah E-Views ver.10, (2024)

Model Efek Acak dipilih karena menurut Uji Hausman, Cross-Section Random bernilai probabilitas sejumlah 0,3974 > 0,05.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Sumber: Data sekunder diolah E-Views ver.10, (2024)

Gambar 1 memperlihatkan bahwa data mengikuti distribusi normal, dan nilai probabilitas sejumlah 0,7484 > 0,05 mendukung kesimpulan dari uji normalitas Jarque-Bera ini. Dengan demikian anggapan ataupun kondisi kenormalan model regresi sudah terpenuhi.

Uji Regresi Data Panel

Tabel 4 Uji Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-statistic	Prob.
C	11.65107	2.441862	4.77139	0.0000
LOG(PAD)	0.386532	0.101863	3.796414	0.0003
LOG(DP)	0.008108	0.057564	0.140849	0.8883

Sumber: Data sekunder diolah E-Views ver.10, (2024)

Berlandaskan Tabel 4, didapat persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = 11,65107 + 0,386532 X_{1it} + 0,008108X_{2it} + e_{it}$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Konstanta sejumlah 11,65107 menyatakan bahwa jika nilai PAD (X_1), Dana Perimbangan (X_2) dianggap konstan atau bernilai 0, maka Belanja Modal sejumlah 11,65107.
2. Koefisien regresi variabel PAD (X_1) sejumlah 0,386532 maknanya bilamana PAD ada peningkatan maka Belanja Modal akan ada peningkatan sejumlah 0,386532 satuan rupiah.
3. Koefisien regresi variabel Dana Perimbangan (X_2) sejumlah 0,008108 maknanya bilamana Dana Perimbangan ada peningkatan maka Belanja Modal akan ada peningkatan sejumlah 0,008108 satuan rupiah.

Uji Hipotesis

Uji t

Tabel 5 Uji t

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-statistic	Prob.
C	11.65107	2.441862	4.77139	0.0000
LOG(PAD)	0.386532	0.101863	3.796414	0.0003
LOG(DP)	0.008108	0.057564	0.140849	0.8883

Sumber: Data sekunder diolah E-Views ver.10, (2024)

Berlandaskan Tabel 5 tersebut, hasil menguji berparsial pengaruh PAD kepada Belanja Modal didapat $t_{hitung} 3,794614 > t_{tabel} 1,98609$ dengan nilai Prob. $0,0003 < 0,05$. Sehingga PAD berpengaruh positif signifikan kepada Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini, H1 **diterima**.

Hasil menguji secara parsial pengaruh Dana Perimbangan kepada Belanja Modal didapat $t_{hitung} 0,140849 < t_{tabel} 1,98609$ dengan nilai Prob. $0,8883 > 0,05$. Sehingga Dana Perimbangan tidak berpengaruh positif signifikan kepada Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini, H2 **ditolak**.

Uji Determinasi Adjusted R Square

Tabel 6 Uji Determinasi Adjusted R Square

Keterangan	Hasil Uji
R-squared	0.143466
Adjusted R-squared	0.124845
S.E. of regression	0.29265
F-statistic	7.704802
Prob (F-statistic)	0.000806

Sumber: Data sekunder diolah E-Views ver.10, (2024)

Hasil uji Adjusted R-Squared adalah 0,124845, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6. Berlandaskan koefisien determinasi, kita dapat melihat bahwa PAD dan Dana Perimbangan, dua variabel independen, menyumbang 12,48 persen Belanja Modal, sementara faktor-faktor lain menyumbang 87,52 persen sisanya.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian (H1) memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara statistik antara PAD dengan Belanja Modal, berlandaskan penelitian yang menguji 95 sampel dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal disebabkan karena adanya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang jelas dan terukur, dengan prioritas pada program-program yang berdampak langsung pada masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan seperti pengembangan pariwisata dan usaha mikro melalui penyediaan modal dan pelatihan. Selain itu karena adanya peninjauan ulang terhadap program yang sudah ditetapkan secara berkala guna melihat seberapa baik pemanfaatan dana tersebut dan untuk melakukan perbaikan terhadap program yang ada.

Hipotesis tersebut terjadi karena pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat memiliki lebih banyak dana untuk dibelanjakan pada proyek infrastruktur dan layanan publik karena adanya peningkatan PAD di kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Salah satunya seperti Kelok 9, Panorama Ampangan, Lembah Harau, dan Kapalo Banda Tarandam, memberikan kontribusi terhadap PAD di

industri pariwisata Kota Payakumbuh (Arieza, 2023). Selain itu peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga diperoleh dari kawasan wisata Pulau Mandeh yang telah menjadi lokasi wisata unggulan di Pesisir Selatan yang tiap tahunnya memikat ribuan wisatawan dan menunjang industri pariwisata daerah mencapai 2 juta wisatawan pada tahun 2023 (Hakim, 2023).

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Silviani & Adiputra (2023), Zulkarnain & Haryati (2023), Malau et al (2020), dan Alvaro & Prasetyo (2020) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki kemampuan yang cukup dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh Kabupaten/Kota telah berhasil dimanfaatkan untuk kepentingan publik melalui peningkatan alokasi modal yang sejalan dengan pertumbuhan PAD yang diperoleh. Pada penelitian saya menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan adanya pengelolaan keuangan daerah yang jelas dan terukur, dengan prioritas pada program-program yang berdampak langsung pada masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan seperti pengembangan pariwisata dan usaha mikro melalui penyediaan modal dan pelatihan.

Di sisi lain, Telaumbanua et al (2021) menemukan PAD berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Ketimpangan fiskal yang diakibatkan oleh pengelolaan keuangan daerah yang tidak efektif menjadi sumber hal tersebut terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Sebaliknya, pada penelitian saya menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang memberikan sumber daya finansial yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur dan pelayanan publik. Salah satunya PAD Kota Payakumbuh yang bersumber dari objek wisata setempat, yakni Kelok 9, Panorama Ampangan, Lembah Harau, dan Kapalo Banda Tarandam yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan (Arieza, 2023).

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan sumber dana moneter yang disebarkan seluruh daerah untuk membantu upaya desentralisasi. Tujuannya adalah untuk menjaga agar pertukaran sehari-hari antar daerah dan pemerintah daerah tetap terkendali. Dalam analisis ini, menolak hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa dana perimbangan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023 tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Dana perimbangan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal disebabkan oleh ketimpangan antara kebutuhan aktual daerah dengan dana yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut memunculkan hal ini. Hipotesis tersebut terjadi karena ketidakcocokan antara alokasi dana dan kebutuhan nyata daerah. Meskipun dana perimbangan bertujuan untuk mendukung pembangunan di daerah, tetapi dana tersebut tidak cukup fleksibel untuk digunakan secara efektif dalam proyek-proyek belanja modal. Selain itu, faktor-faktor seperti ketidakmampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola proyek belanja modal dapat menghambat penggunaan dana perimbangan secara optimal. Akibatnya, meskipun dana perimbangan tersedia, dampaknya terhadap belanja modal menjadi tidak bermakna.

Hal ini menjelaskan kenapa peningkatan ataupun penyusutan belanja modal tidak terpengaruh oleh besar ataupun kecilnya dana perimbangan. Dana Perimbangan tidak mengurangi kemampuan atau komitmen pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Modal. Jika Dana Perimbangan dikelola dengan baik, maka seharusnya mendukung Belanja Modal bukan menghambat atau mengurangi.

Tidak hanya memberikan dukungan keuangan kepada pemerintah daerah, Dana Perimbangan mendorong pemerataan pembiayaan di bermacam sektor dalam upaya menutup kesenjangan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Akbar (2023), belum semua daerah terlayani dengan baik oleh pemerintah. Akibatnya, masyarakat yang tinggal di daerah dengan kondisi jalan yang buruk, seperti berlubang dan permukaan yang tidak rata, sering kali harus mencari rute alternatif yang lebih aman untuk mencapai tempat tujuan mereka. Siberut Utara, Siberut Tengah, dan Siberut Barat Daya merupakan 3 kecamatan di Pulau Siberut yang terhubung oleh infrastruktur darat Hendra, E. (2023).

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan Silviani & Adiputra (2023), Hadi & Kusuma (2023), Irwan et al (2022), Muttaqin et al (2021), dan Salim (2019) Dana Perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan adanya peningkatan Belanja Modal yang dapat memperbaiki infrastruktur serta meningkatkan pelayanan publik, sekaligus menciptakan

keseimbangan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan fiskal dapat dihindari. Tidak hanya itu, desentralisasi sudah mengizinkan pemerintah pusat dan daerah untuk terus bekerja sama dalam rangka meningkatkan penyediaan dana publik. Pada penelitian saya menyatakan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan adanya ketimpangan antara alokasi dana dan kebutuhan nyata daerah. Dana Perimbangan dari pemerintah pusat tidak dikelola dengan efisien oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, sehingga terdapat pembangunan infrastruktur yang belum memadai, adanya akses jalan yang buruk dan fasilitas transportasi yang minim yang berdampak terhadap masyarakat, Siberut Utara, Siberut Tengah, dan Siberut Barat Daya merupakan 3 kecamatan di Pulau Siberut yang terhubung oleh infrastruktur darat (Hendra, E 2023).

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023, hal ini terjadi karena masih adanya pengelolaan PAD yang berhasil mengalokasikan modal sesuai dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang terkumpul. Sebaliknya, Dana Perimbangan ditemukan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023. Hal ini disebabkan karena dalam rentang waktu tersebut, Dana Perimbangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki kekurangan dalam hal perencanaan yang matang dan kurangnya kapasitas pengelolaan yang mengakibatkan penggunaan dana yang tidak efisien. Ini mencerminkan perlunya peningkatan kapasitas manajerial dan perencanaan yang lebih matang dalam pemanfaatan Dana Perimbangan, agar dapat digunakan secara efisien untuk mendukung pembangunan daerah. Dari perspektif praktis, temuan ini memiliki dampak signifikan bagi pembuat kebijakan. Pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan berbasis data dalam perencanaan anggaran, mengidentifikasi kebutuhan nyata masyarakat, dan merancang program yang sesuai dengan potensi daerah.

SARAN

Saran Praktis

Dari hasil penelitian ini disarankan oleh peneliti untuk pemerintah daerah memperkuat perencanaan belanja modal dengan mengintegrasikan perkiraan PAD dan Dana Perimbangan. Hal ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap potensi pendapatan dan kebutuhan belanja untuk memastikan bahwa alokasi anggaran tepat sasaran. Selain itu disarankan agar pemerintah daerah juga dapat menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis terhadap penggunaan anggaran belanja modal. Hal ini penting untuk dilakukan dalam menilai efektivitas dan efisiensi dari investasi yang dilakukan, serta untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Saran Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada perencanaan dan penganggaran dana dengan menyoroti pentingnya integrasi antara PAD, Dana Perimbangan, dan penganggaran belanja modal. Pemerintah daerah disarankan mengintegrasikan informasi mengenai PAD dan Dana Perimbangan dalam tahap perencanaan anggaran, dengan memanfaatkan data historis dan proyeksi, pemerintah dapat merencanakan belanja modal yang lebih realistis dan sesuai dengan potensi pendapatan daerah. Saran yang diberikan dapat digunakan untuk mengembangkan pendekatan perencanaan yang lebih baik dan berbasis data. Untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan penelitian, diharapkan penelitian lebih lanjut akan mencakup variabel - variabel terkait termasuk keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, serta kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini akan memungkinkan peneliti untuk menganalisis interaksi kompleks antara faktor-faktor tersebut dan dampaknya terhadap kinerja keuangan daerah.

REFERENSI

Akbar, R. (2023). *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan Jalan Yang Tidak Merata di Mentawai*. Diakses: 16 Oktober 2024. Retrieved from <https://mentawai.kita.com/index.php/baca/6389/kebijakan-pemerintah-terhadap-pembangunan-jalan-yang-tidak-merata-di-mentawai>

- Alvaro, R., & Prasetyo, A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Provinsi di Indonesia. *Jurnal Budget*, 5(2), 1-120. Retrieved from [cd96c9861e9a0ecb4d5d7d3a3c7e2e3437a2.pdf](https://doi.org/10.24054/journal.budget.v5i2.120)
- Ambya, A. (2023). *Ekonomi Keuangan Daerah*. Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja. Retrieved from [https://www.bing.com/ck/a?!&p=c8a95b9cd789bef104b0c76d252afc22024af9bf47acd8f9d7e8517f725fb96eJmltdHM9MTczNjk4NTYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=33a6de16-f37b-6f3e-308a-cb23f2f16ed3&psq=Ambya%2c+A.\(2023\).+Ekonomi+Keuangan+Daerah.+Bandar+Lampung%3a+Aura+CV.+Anugrah+Utama+Raharja.&u=a1aHR0cDovL3JlcG9zaXRvenkubHBwbS51bmlsYS5hYy5pZC81MTQ1MS8&ntb=1](https://www.bing.com/ck/a?!&p=c8a95b9cd789bef104b0c76d252afc22024af9bf47acd8f9d7e8517f725fb96eJmltdHM9MTczNjk4NTYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=33a6de16-f37b-6f3e-308a-cb23f2f16ed3&psq=Ambya%2c+A.(2023).+Ekonomi+Keuangan+Daerah.+Bandar+Lampung%3a+Aura+CV.+Anugrah+Utama+Raharja.&u=a1aHR0cDovL3JlcG9zaXRvenkubHBwbS51bmlsYS5hYy5pZC81MTQ1MS8&ntb=1)
- Arieza, U. (2023). *Wisata Alam di Payakumbuh, Banyak Bukit dengan Panorama Indah*. Diakses: 16 Oktober 2024. Retrieved from <https://travel.kompas.com/read/2023/09/25/104000127/10-wisata-alam-di-payakumbuh-banyak-bukit-dengan-panorama-indah-?page=all>
- Astuty, S. (2022). Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 08(3), 475–487. Retrieved from <https://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>
- Bps, B. (2024). *Anggaran dan Realisasi Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat*. Diakses: 20 Desember 2024. Retrieved from <https://www.bps.go.id/>
- Dilliana, S. M., & Herdi, H. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. Retrieved from <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/556947-manajemen-keuangan-daerah-e026339b.pdf>
- Djpk, D. (2024). *Anggaran dan Realisasi Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat*. Diakses: 5 April 2024. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Ernawati, A. V., Rasdiana, R., Abas, M., Yusriani, Y., Hadawiah, H., Hidayah, N., Sabtohadhi, J., Marlina, H., Mulyani, W., & Zulkarnaini, Z. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi. Retrieved from <https://g.co/kgs/yrTfpRP>
- Hadi, M. S., & Kusuma, D. I. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 51-65. <https://doi.org/10.53916/jeb.v17i1.35>
- Hakim, A. (2023). *Pesisir Selatan Siap Kembangkan Kawasan Wisata Terpadu Mandeh*. Diakses: 16 Oktober 2024. <https://doi.org/https://mataram.antaranews.com/berita/330771/pesisir-selatan-siap-kembangkan-kawasan-wisata-terpadu-mandeh>
- Hardani, H., Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, Roushandy Asri Ustiawaty, J., Utami, E. F., & Sukmana, Dhika Juliana Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Assoc-Prof-Msi/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif/links/5e72e011299bf1571848ba20/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif-Kuantitatif.pdf
- Hendra, E. (2023). *Tiga Kecamatan di Pantai Barat Siberut Masih Terisolasi, 160 Km Jalan Belum Terbuka*. Diakses: 16 Oktober2024. <https://padek.jawapos.com/mentawai/2363764210/tiga-kecamatan-di-pantai-barat-siberut-masih-terisolasi-160-km-jalan-belum-terbuka>
- Hermawan, E., Suprayitno, D., Vikaliana, R., & Hermawan, R. (2022). *Buku Ajar Penelitian Kuantitatif*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara. Retrieved from <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/558761-buku-ajar-penelitian-kuantitatif-5cb2f184.pdf>
- Irwan, I., Mursalim, M., & Nurwanah, N. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan). *Journal of Accounting Finance (JAF)*, 3(1), 58-74. <https://doi.org/10.52103/jaf.v1i1>

- Mahfudh, M., Saleh, H., & Saleh, M. Y. (2022). *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Gowa: Pusaka Almada. Retrieved from https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=5Tj2_OYAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=5Tj2_OYAAAAJ:OU6Ihb5iCvQC
- Malau, E. I., Calen, C., Siregar, V. M. M., & Saragih, K. Y. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Owner*, 4(1), 356-361. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.168>
- Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22-28. <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7>
- Rinando, E., & Rivandi, M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022. *Riset Ilmu Akuntansi*, 3(1), 320-335. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v3i1.1492>
- Salim, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Inflasi Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Periode Tahun 2015-2018 (Penelitian di Kota/Kabupaten Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(2), 164-179. <https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v4i2.5875>
- Shatila, A., Rahayu, S., & Jumaili, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Lentera Bisnis*, 12(2), 486-507. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v12i2.772>
- Silviani, N. L. P. D., & Adiputra, I. M. P. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Budget Ratcheting Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Bali). *Vjra*, 12(2), 152-163. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/vjra.v12i2.63761>
- Srinofril, W., & Ananda, F. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021. *Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(1), 55-68. <https://doi.org/10.30640/digital.v2i2.1053>
- Sugiyono, S. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. Retrieved from <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22862>
- Telaumbanua, N. E., Doloksaribu, M., Sirait, C. D., & Malau, Y. N. (2021). Pengaruh PDRB, PAD, Dana Berimbang, SiLPA Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(1), 1-10. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i1.12072>
- Wahyudi, J. (2024). *10 kilometer Jalan Rusak, Warga Desak Pemprov Perbaiki Jalan*. Diakses: 19 Desember 2024. Retrieved from <https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detil/7655/10-kilometer-jalan-rusak-,-warga-desak-pemprov-perbaiki-jalan.html>
- Yuswanto, Y., Putri, M. E., & Andriani, F. (2020). *Redesain Hukum Perimbangan Keuangan Dari Dana Bagi Hasil Sektor Pajak*. Bandar Lampung: Pusaka Media. Retrieved from <http://repository.lppm.unila.ac.id/39667/2/YUSWANTO%20REDESAIN%20HUKUM%20PERIMBANGAN%20KEUANGAN.pdf>
- Zulkarnain, Z. I., & Haryati, T. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 22(1), 27-37. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v22i1.204>